

## Membedah Demokratisasi dalam Perspektif Aktivisme Transnasional

Oleh :  
Aleksius Jemadu

*Transnational Activism in Asia: Problems of Power and Democracy*, Nicola Piper and Anders Uhlin (eds.), (London: Routledge, 2004), xvii + 194 halaman, termasuk indeks.

**B**uku ini muncul pada saat yang tepat di mana semakin banyak anggota masyarakat kita yang sudah jengah dengan demokrasi. Banyak orang mempertanyakan apakah demokratisasi merupakan konsep yang tepat untuk menggambarkan dan menganalisis situasi politik di Indonesia setelah lengsernya kekuasaan otoriter Soeharto. Ada juga pertanyaan apakah teori demokrasi yang berbasis *nation-state* masih relevan di tengah dominasi lembaga - lembaga pembangunan dan keuangan internasional yang menampilkan ciri *democratic deficit*. Globalisasi yang dikendalikan oleh global market governance dengan nuansa neoliberal yang pekat melahirkan persoalan-persoalan seperti keadilan sosial dan representasi kepentingan yang lebih inklusif (John Baylis and Steve Smith, 1999). Atas dasar itu para pakar ilmu politik mulai memberi perhatian pada aktor-aktor di luar negara yang aktif berkiprah secara transnasional dan

membentuk apa yang dikenal dengan istilah *global civil society* (Paul R. Viotti dan Mark V. Kaupi, 1997). Aktor-aktor tersebut terlibat dalam proses "globalisasi dari bawah".

Ada dua kata kunci yang memberikan indikasi tentang isi analisis buku ini yaitu *activism* dan *transnational*. Yang dimaksud dengan *activism* adalah kegiatan-kegiatan politik yang dicirikan oleh konflik kepentingan, menciptakan tantangan atau dukungan bagi struktur-struktur kekuasaan tertentu, melibatkan aktor-aktor non-negara, dan beroperasi di luar arena-arena politik yang formal (hal. 4). Karakteristik transnasional dari aktivisme yang dimaksud mencakup beberapa unsur. Pertama, kegiatan politik yang tersebut bisa difokuskan pada isu-isu transnasional seperti lingkungan hidup, hak azasi manusia, atau kesehatan masyarakat. Kedua, ada keterlibatan aktor-aktor transnasional baik dari segi struktur organisasinya yang

*cross national borders* maupun keragaman kewarganegaraan dari para aktivisnya. Ketiga, digunakannya strategi dan metode yang transnasional, misalnya penggunaan internet untuk pengorganisasian kegiatan. Keempat, target dari kegiatannya bisa masyarakat di satu negara atau beberapa negara yang berbeda dari negara asal para aktivis. Kelima, para aktivis memiliki pandangan-pandangan yang bersifat transnasional (*transnational worldviews*), dan memandang dirinya sebagai warga dunia (hal.5).

Selanjutnya analisis aktivisme transnasional dikontekstualisasikan dalam tiga aspek yaitu masalah kekuasaan (*problems of power*), masalah demokrasi (*problems of democracy*) dan aspek kewilayahan yaitu konteks perkembangan di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam buku ini aktivisme internasional dihadapkan dengan kekuasaan negara dan dominasi struktur-struktur ekonomi politik global yang diperankan oleh lembaga-lembaga pembangunan dan keuangan internasional. Dalam konteks kekuasaan negara dikemukakan bahwa memang globalisasi mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan negara tetapi belum tentu memperlemah kekuasaan tersebut. Buku ini, misalnya, mengutip hasil observasi dari Colas (2002) yang menemukan bahwa "*the structures of the international system still oblige*

*[social] movements to pursue their political goals through the different organs of the sovereign state*". Misalnya, kegiatan Transparency International yang bertujuan mewujudkan *good governance* dialamatkan kepada institusi-institusi pemerintahan yang melayani kepentingan publik. Dari kenyataan itu disimpulkan bahwa "*international social movements reinforce as much as they undermine state sovereignty*" (Colas, 2002). Meskipun demikian kita tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa jaringan internasional NGOs memiliki apa yang disebut *discursive or communicative power*. Jaringan-jaringan yang mengglobal ini memungkinkan terjadi kontestasi diskursus demi melahirkan alternatif-alternatif model pembangunan yang lebih menjamin keadilan dan pemerataan. Teori tentang *global democracy* dalam rangka memperluas cakupan teori demokrasi ke luar wilayah *nation-state* seperti yang dikembangkan oleh John S. Dryzek (2000) menekankan pentingnya kontestasi diskursus yang dimotori oleh jaringan internasional NGOs.

Konteks berikutnya adalah masalah demokrasi. Buku ini menjelaskan hubungan timbal balik antara aktivisme transnasional dengan demokrasi. Pertama, melalui berbagai studi kasus ditemukan bahwa tingkat demokrasi di suatu negara mempengaruhi

kemampuan aktivis untuk terlibat dalam aktivisme internasional. Meskipun otoriterisme membatasi kesempatan yang ada bagi aktivis, namun hal tersebut bisa menjadi boomerang bagi pemerintah. Kenyataan ini ditunjukkan oleh pengalaman Malaysia. Kedua, aktivisme transnasional dapat memberikan kontribusi terhadap demokratisasi di suatu negara meskipun proses "*bureaucratic bargaining*" di antara elit politik dan militer dapat meminimalkan dan bahkan menganulir kontribusi tersebut. Studi kasus tentang Indonesia (chapter 9) membuktikan pola keterkaitan tersebut. Ketiga, aktivisme transnasional dapat mendorong demokratisasi isu-isu transnasional dan pembuatan keputusan transnasional tetapi gagasan-gagasan tentang global democracy ini mengabaikan kenyataan tentang "*the resilience of state power*" (bab 2). Keempat, kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah "*democratic deficit*" yang terjadi di dalam jaringan aktivis transnasional. Sebagai ilustrasi, masih ada gap yang lebar antara NGOs dari negara-negara maju dan NGOs negara-negara berkembang yang aktivitasnya sangat dikondisikan dan dibatasi oleh ketergantungan terhadap *funding* dari *counterpartnya* di negara-negara maju. Selain itu tidak ada bukti yang cukup bahwa NGOs dengan jaringan transnasionalnya benar-benar mewakili kelompok-kelompok akar rumput di

negara-negara berkembang atau mereka tampil tidak lebih sebagai wakil representasi kelas menengah yang cenderung mempertahankan status quo.

Secara umum buku ini terdiri dua bagian yang saling berkaitan dan dirangkaikan begitu sistematis oleh kedua editor. Pertama, penelusuran teoritis tentang konsep dan teori mutakhir tentang aktivisme transnasional. Keunikan buku ini adalah analisis tersebut dikontekstualisasikan dalam permasalahan kekuasaan dan demokrasi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah tertentu yaitu Asia Timur dan Asia Tenggara. Kedua, pemaparan studi kasus di beberapa negara. Memang harus diakui bahwa kasus-kasus yang ditampilkan secara detail agak terbatas yaitu hanya mencakup Malaysia, Singapore, Indonesia, dan Taiwan, namun beberapa bab memberikan ilustrasi tentang fenomena aktivisme transnasional di China dan Jepang. Hal ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk mempertanyakan sejauhmana berbagai studi kasus yang digunakan cukup representatif seperti yang dikesankan dalam judulnya.

Terlepas dari kekurangan yang ada, buku ini penting untuk memperkaya pengetahuan teoritis maupun praktis dari fenomena aktivisme transnasional. Selain ditulis oleh kombinasi penulis dengan latarbelakang yang sangat beragam

(dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang di Asia), buku ini dapat mengatasi minimnya literature tentang topik yang sama di Asia Tenggara. Baik aktivis NGOs maupun kalangan academia yang berminat perlu membaca buku ini untuk mengetahui *state of the art* dari fenomena aktivisme transnasional. \*\*\*

**Referensi:**

**Colas, A.,** *International Civil Society. Social Movements in World Politics*, Cambridge: Polity Press, 2002.

**Dryzek, John S.,** *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics and Contestations*, Oxford: Oxford University Press, 2000.

**Scholte, Jan Art,** "The Globalization of World Politics" dalam John Baylis and Steve Smith (eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press, 1999.

**Viotti, Paul R. and Mark V. Kauppi,** *International Relations and World Politics: Security, Economy and Identity*, Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997.